



PERJANJIAN KINERJA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

TAHUN 2025





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Supratman Andi Agtas

Jabatan : Menteri Hukum

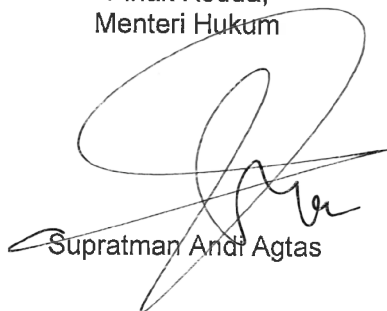
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

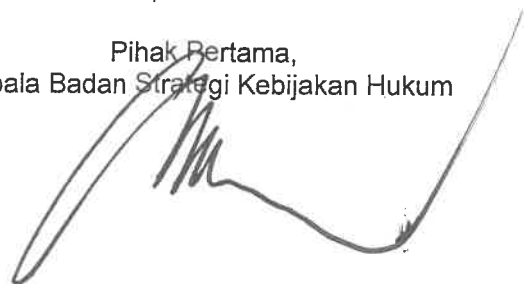
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum



Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

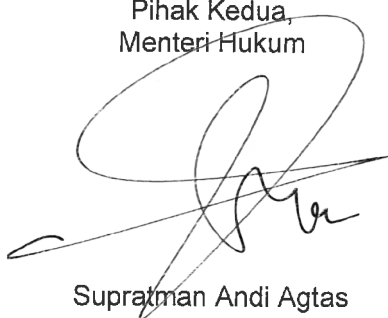
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DENGAN MENTERI HUKUM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65
2.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 97.148.968.000,-
1.	Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	Rp. 68.396.623.000,-
2.	Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Pembinaan Hukum	Rp. 6.050.377.000,-
3.	Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Rp. 3.375.917.000,-
4.	Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Rp. 3.082.927.000,-
5.	Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	Rp. 4.562.058.000,-
6.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp. 11.681.066.000,-

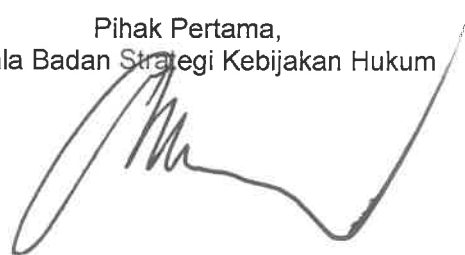
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum



Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Harnanto
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum

Dwi Harnanto
NIP. 197206201997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 68.396.623.000,-
Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum	Rp 68.396.623.000,-

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum



Dwi Harnanto
NIP. 197206201997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Harnanto

Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum


Dwi Harnanto
NIP. 197312251993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junarlis

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum

Junarlis
NIP. 196807011991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang ditindaklanjuti	95 %
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	3,1
		2. Indeks Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Hukum	Predikat Istimewa (90-100)

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.050.377.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Rp 6.050.377.000,-

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum



Junarlis
NIP. 196807011991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
**KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junarlis

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum

Junarlis

NIP. 196807011991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadiyanto
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan
Hukum

Hadiyanto
NIP. 197208151994031001

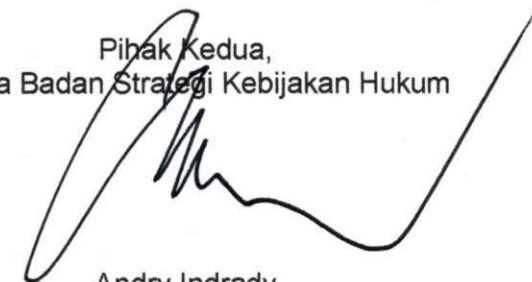
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	95 %
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1
		2. Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum	80%

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.375.917.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	Rp 3.375.917.000,-

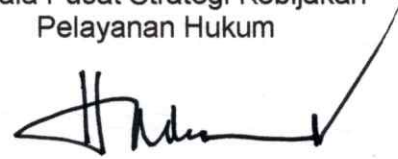
Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum



Hadiyanto
NIP. 197208151994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hadiyanto

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pelayanan Hukum

Hadiyanto
NIP. 197208151994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmayanthy
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum

Rachmayanthy
NIP. 196904261992032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum	Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum yang ditindaklanjuti	95 %
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3,1
		2. Indeks Layanan Kesekretariatan Kementerian Hukum	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 3.082.927.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	Rp 3.082.927.000,-

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum



Rachmayanthi
NIP. 196904261992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmayanthy

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum

Rachmayanthy
NIP. 196904261992032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yani Firdaus

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

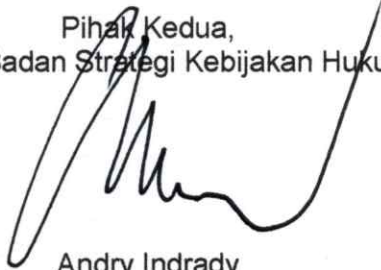
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Publikasi Kebijakan Hukum


Muhammad Yani Firdaus
NIP. 196510011985031001

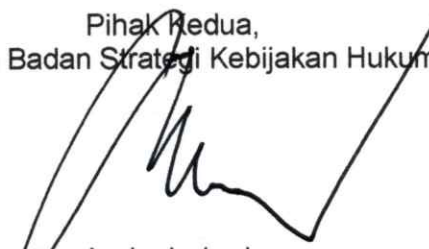
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN
HUKUM DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum	Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum yang ditindaklanjuti	95 %
2.	Terpublikasikannya hasil analisis strategi kebijakan di media publikasi	Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan	82%
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,1
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum	65,00

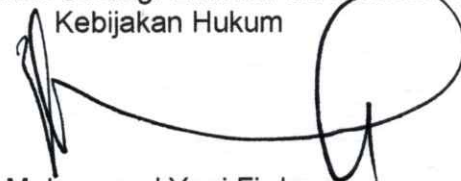
Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.562.058.000,-
Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	Rp 4.562.058.000,-

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi
Kebijakan Hukum


Muhammad Yani Firdaus
NIP. 196510011985031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yani Firdaus

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Publikasi Kebijakan Hukum

Muhammad Yani Firdaus
NIP. 196510011985031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuditia Nurimaniar
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dwi Harnanto
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

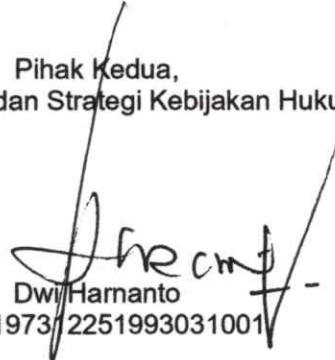
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

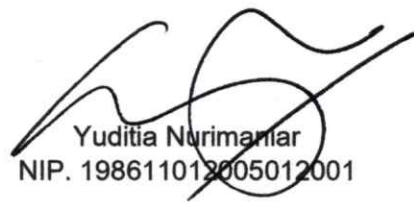
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum


Dwi Harnanto
NIP. 1973/2251993031001

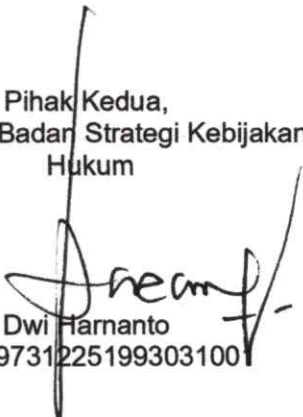
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pelaporan


Yuditia Nurimaniar
NIP. 198611012005012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN DENGAN
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

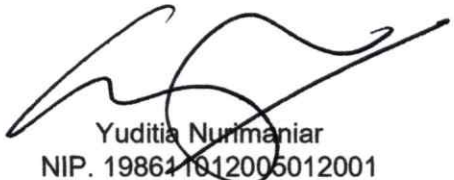
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Persentase capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum	90%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan perencanaan dan keuangan	3,1

Pihak Kedua,
 Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
 Hukum


 Dwi Harnanto
 NIP. 197312251993031001

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
 Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan


 Yuditia Nurmaniar
 NIP. 198611012006012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daryono

Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dwi Harnanto

Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

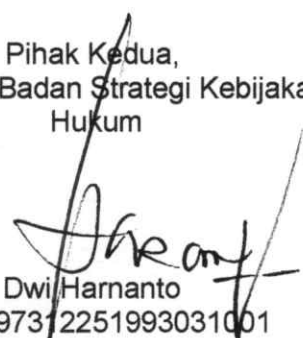
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum


Dwi Harnanto
NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
dan Organisasi

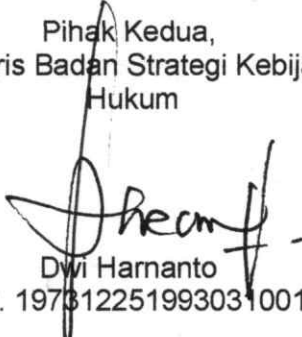

Daryono
NIP. 197609122003121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI DENGAN
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan sumber daya manusia	3,1

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum


Dwi Harnanto
NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
dan Organisasi


Daryono
NIP. 197609122003121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Salamah
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dwi Harnanto
Jabatan : Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

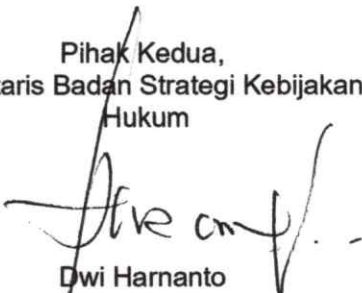
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
Hukum


Dwi Harnanto
NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Umum

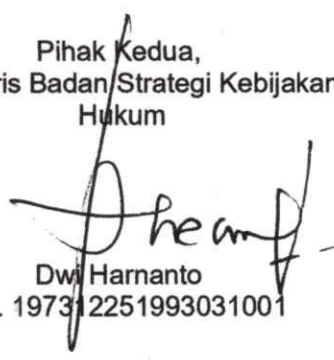

Umi Salamah
NIP. 197006281999032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN UMUM DENGAN
SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan barang milik negara, umum dan hubungan masyarakat	3,1
		2. Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum (<i>availability time</i>)	98%

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Sekretaris Badan Strategi Kebijakan
 Hukum


 Dwi Harnanto
 NIP. 197312251993031001

Pihak Pertama,
 Kepala Bagian Umum


 Umi Salamah
 NIP. 197006281999032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Prasetyo
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Umi Salamah
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum


Umi Salamah
NIP. 197006281999032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Rumah Tangga


Ibnu Prasetyo
NIP. 198604252005011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan kerumahtanggaan	3,1
		2. Tingkat ketersediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi Badan Strategi Kebijakan Hukum (<i>availability time</i>)	98%

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum



Umi Salamah
NIP. 197006281999032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Rumah Tangga



Ibnu Prasetyo
NIP. 198604252005011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Sri Dwijayanti
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Umi Salamah
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum

Umi Salamah
NIP. 197006281999032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol

Yuni Sri Dwijayanti
NIP 199106092010122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL
DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum terhadap layanan tata usaha pimpinan dan keprotokolan	3,1

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bagian Umum



Umi Salamah
NIP. 197006281999032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol



Yuni Sri Dwijayanti
NIP 199106092010122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bertua Irene Situmeang
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Junarlis
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum

Junarlis
NIP 196807011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum

Bertua Irene Situmeang
NIP 196802122001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN KEPALA PUSAT STRATEGI
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PEMBINAAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan (LKJIP)

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum



Junarlis
NIP 196807011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum



Bertua Irene Situmeang
NIP 196802122001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leny Triswirly

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hadiyanto

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pelayanan Hukum

Hadiyanto
NIP 197208151994031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pelayanan Hukum

Leny Triswirly
NIP 197309052003122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM
DENGAN KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Pelayanan Hukum



Hadiyanto
NIP 197208151994031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Pelayanan Hukum



Leny Triswirly
NIP 197309052003122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Yustika

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rachmayanthi

Jabatan : Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum

Rachmayanthi
NIP 196904261992032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Tata Kelola Hukum

Mutia Yustika
NIP 197610132006042001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM DENGAN
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum



Rachmayanthi
NIP 196904261992032001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi
Kebijakan Tata Kelola Hukum



Mutia Yustika
NIP 197610132006042001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dade Zulaecha
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yani Firdaus
Jabatan : Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Publikasi Kebijakan Hukum

Muhammad Yani Firdaus
NIP 196510011985031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi
Kebijakan Hukum

Dade Zulaecha
NIP 197804122001122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI
KEBIJAKAN HUKUM DENGAN KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI
KEBIJAKAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum	1. Indeks kepuasan layanan ketatausahaan di lingkup Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	3,1
		2. Jumlah data capaian kinerja Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	12 Dokumen
		3. Jumlah laporan capaian kinerja Pusat Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum	1 Laporan (LKjIP)

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan
Publikasi Kebijakan Hukum



Muhammad Yani Firdaus
NIP 196510011985031001

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan
Hukum



Dade Zulaecha
NIP 197804122001122001